



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
**SUB UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BUDI SETIYADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**
3. NHK : **454201**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.100.000.000

1. Tanah Seluas 17000 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/42 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 320.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, VIAR MOTOR VIAR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA FORZA FORZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 40.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.776.616.681**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.237.116.681**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.237.116.681

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.